

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Oemar Seno Adji & rekan, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Khairandy, Ridwan, H. Amrani, dan D. S. Ritonga, 2018, *Korupsi Kerugian Keuangan Negara di BUMN*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Pramono, Widyo, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas, Jakarta.
- Priyono, B. Herry, 2018, *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1974, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Sampford, Charles, A. Shacklock, C. Conors, dan F. Galtung, 2006, *Law, Ethics, and Governance Series: Measuring Corruption*, Routledge, New York.
- Satrio, J., 1999, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2008, “150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas”, ForumSahabat, Jakarta.
- Witanto, D. Y., 2012, *Kerugian Negara dalam Hubungan Kontraktual*, Mandar Maju, Bandung.

B. Artikel Jurnal

- Asnawi, M. Iqbal, “Implikasi Pengelolaan BUMN Persero dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. II, No. I, Januari-Juni 2016.
- Jr., J. Robert Brown, “Disloyalty without Limits: Independent Directors and the Elimination of the Duty of Loyalty”, *Kentucky Law Journal*, Vol. 95, No. 53, 2006-2007.
- Sipayung, John F., B. Nasution, dan M. Siregar, “Tinjauan Yuridis Holdingisasi BUMN dalam rangka Peningkatan Kinerja Menurut Perspektif Hukum Perusahaan”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. I, No. 1, Februari-Mei 2013.
- Wicaksono, Agung, “INDONESIAN STATE-OWNED ENTERPRISES: The Challenge of Reform”, *Southeast Asian Affairs*, Tahun 2008.

Wilda, Estanto Bobby, “Urgensi Holding BUMN dalam Peningkatan Sektor Pelayanan Angkutan Darat dan Udara”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 2, April 2018.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Bakar, Rochmad Abu, 2019, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Direksi Holding Badan Usaha Milik Negara atas Kerugian Investasi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam kaitannya dengan Kerugian Negara (Studi Kasus: Investasi PT Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi di Australia)*, tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Noor, Hendry Julian, 2018, *Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*, disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sakti, Dhenis Prabowo, 2018, *Status Negara dalam Anak Perusahaan BUMN dan Akibat Hukum Akta Pendirian atau Penyertaan Modal ke dalam Anak Perusahaan yang dibuat oleh Notaris (Studi Kasus PT INKA Persero)*, tesis, Program Pascasarjana Magister Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Yuntho, Emerson, I.D.A. Sari, J. Limbong, R. Bakar, dan F. Ilyas, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

D. Makalah

Adji, Indriyanto Seno, “Antara Kebijakan Publik (*Publiek Beleid*), Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Makalah*, Seminar Nasional tentang Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang, 6-7 Mei 2004.

E. Internet

Aries, Albert, “Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan Lepas”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5122909d10411/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas>, diakses 3 Oktober 2021.

Budiawan, Anthony, “Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN”, <https://publika.rmol.id/read/2019/06/15/392902/status-anak-perusahaan-bumn-adalah-bumn>, diakses 17 Oktober 2021.

Cyber, Red. “Korupsi PT POS Properti Indonesia, Mantan PNS Rugikan Negara Rp 15 Miliar”, <https://www.patrolicyber.com/korupsi-pt-pos-properti->

indonesia-mantan-pns-rugikan-negara-rp-15-miliar/, diakses 14 Oktober 2021.

H., Priyambodo R., “Zainul Arifin, Mantan Wadir Petral, Divonis Empat Tahun Penjara”, <https://www.antaraneews.com/berita/40097/zainul-arifin-mantan-wadir-petral-divonis-empat-tahun-penjara>, diakses 20 Juni 2021.

Humas FH UI, “Diskursus Anak Perusahaan BUMN Oleh Dr. Dian Puji N Simatupang”, <https://law.ui.ac.id/v3/diskursus-anak-perusahaan-bumn-oleh-dr-dian-puji-n-simatupang/>, diakses tanggal 17 Oktober 2021.

Indonesia Corruption Watch, “Mengadili Kebijakan”, <https://antikorupsi.org/id/article/mengadili-kebijakan>, diakses 16 Juli 2021.

KBBI Daring, “Pengertian Kerugian”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerugian>, diakses 3 Februari 2021.

KBBI Daring, “Pengertian Korupsi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>, diakses 27 Januari 2021.

KBBI Daring, “Pengertian Rugi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rugi>, diakses 3 Februari 2021.

Kharisma, Dona Budi, “Status Hukum Anak Perusahaan BUMN”, <https://www.solopos.com/status-hukum-anak-perusahaan-bumn-999259>, diakses 17 Oktober 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Perkara yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) 2020”, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/penanganan-perkara/inkracht>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Instansi”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses tanggal 14 Oktober 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses 14 Oktober 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PT Bandung 16/PID.TPK/2021/PT BDG”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec11168d299aeebf2b303933353039.html>, diakses 15 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri Bandung, “Informasi Detail Perkara 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg”, http://sipp.pn-bandung.go.id/detil_perkara, diakses 14 Oktober 2021.

F. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Staatsblad 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 710).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006).

G. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 perihal kasasi perkara Ir. Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan, 9 Maret 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017 perihal Uji Materiil Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, 8 Juni 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011 perihal kasasi perkara Ir. Rukasah Darajat, M.M., I.P.M., 2 Februari 2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 perihal kasasi perkara Ferederick S. T. Siahaan, 2 Desember 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, 27 Juni 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 24 Juli 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 3 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 18 September 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst perihal putusan tingkat pertama perkara Ferederick S. T. Siahaan, 18 Maret 2019.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI perihal banding perkara Ferederick S. T. Siahaan, 1 Juli 2019.